

KONTRIBUSI UMKM (USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH) TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Yuke^{1*}, Naim²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Pendidikan Ekonomi
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Corresponding Author: mrndyuke@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: UMKM,
Ekonomi Nasional,
Pembangunan Ekonomi,
Globalisasi

Received : 1 Januari

Revised : 5 Januari

Accepted: 13 Januari

ABSTRAK

Dalam era globalisasi, pembangunan bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan pemerintah. Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi sangat penting bagi suatu negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Bagaimana peran UMKM dalam pembangunan ekonomi adalah tujuan penelitian ini. Penelitian ini melakukan studi literatur secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM sangat berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. Namun, pemerintah berupaya menyelesaikan masalah ini dan memastikan UMKM dapat berkembang dan berdaya saing.

PENDAHULUAN

Untuk suatu bangsa atau negara, masalah utama adalah menemukan kondisi masyarakat ideal dan bagaimana cara mewujudkannya. Pembangunan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pencarian formula dan pendekatan ideal untuk perubahan masyarakat. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi masa depannya dikenal sebagai pembangunan. Tingkat hidup yang lebih baik muncul sebagai hasil dari pembangunan. Dalam era globalisasi, pembangunan sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan pemerintah. Namun, jika pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata dan tidak mengimbangi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, pembangunan akan rapuh. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran

pembangunan negara. Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi sangat penting bagi suatu negara. Namun, pembangunan secara keseluruhan juga mencakup pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan batasan ini, pembangunan ekonomi biasanya didefinisikan sebagai suatu proses yang menghasilkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut definisi ini, pembangunan ekonomi memiliki tiga karakteristik penting: itu adalah proses yang berarti perubahan terus-menerus; upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita; dan kenaikan ini harus berlangsung dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh masyarakat dan pemerintah dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk merancang dan membangun ekonomi daerah. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, terutama dalam pembangunan ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sangat penting dan strategis. UMKM dianggap sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi karena mereka dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Selain itu, UMKM juga sudah diakui sebagai salah satu yang paling penting dalam perekonomian terlepas dari ukuran perekonomiannya (Saleh dan Nelson, 2006). Kondisi ini sangat memungkinkan karena UMKM mendominasi perekonomian Indonesia dengan jumlah industri yang besar dan tersebar di setiap sektor ekonomi, memiliki potensi yang besar untuk penyerapan tenaga kerja, dan sangat dominan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

UMKM memiliki potensi yang begitu besar namun kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan dalam bidang internal maupun eksternal. Maka perlu penelitian yang berkaitan dengan UMKM yang diharapkan dapat membantu dan mengatasi persoalan permasalahan dalam UMKM sehingga hasil penelitian membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya. (Tejasari, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan membahas peran UMKM dalam pembangunan perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi oleh UMKM, dan strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut untuk mendukung dan mewujudkan UMKM yang mandiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses yang meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan kelembagaan, sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat secara holistik (Sadono Sukirno, 1996; Lincoln Arsyad, 2010). UMKM memainkan peran signifikan dalam pembangunan ini

dengan menyerap tenaga kerja, mendukung pemerataan hasil pembangunan, dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Definisi dan Peran UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha dengan kriteria tertentu berdasarkan aset dan hasil penjualan. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, menyumbang lebih dari 61% PDB nasional, dan menyerap hingga 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UMKM). Meskipun demikian, UMKM menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan pendidikan SDM yang rendah, yang diperparah oleh pandemi COVID-19.

Tantangan dan Strategi Pengembangan UMKM

Selama pandemi, UMKM menghadapi masalah pasokan, cash flow, dan penurunan permintaan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mendorong digitalisasi UMKM. Selain itu, UU Cipta Kerja 2020 dirancang untuk menyederhanakan regulasi bagi UMKM.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menggali informasi tentang kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan pemerintah, undang-undang, dan situs web terpercaya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara daring, sehingga memungkinkan akses yang lebih luas terhadap berbagai literatur terkait. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan peran strategis UMKM, tantangan yang dihadapi, serta strategi pengembangan yang relevan. Metode ini dipilih karena efektif dalam memahami fenomena secara mendalam tanpa memerlukan interaksi langsung, sesuai dengan kebutuhan penelitian modern yang lebih fleksibel.

HASIL PENELITIAN

1. **Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional**
UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, antara lain :
 - 1) **Kontribusi terhadap PDB:** UMKM menyumbang 61,97% dari total PDB nasional pada tahun 2020, dengan nilai mencapai Rp 8.573,89 triliun.
 - 2) **Penyerapan Tenaga Kerja:** UMKM menyerap hingga 97% tenaga kerja di Indonesia, menunjukkan perannya dalam mengurangi tingkat pengangguran.

- 3) **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** UMKM berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja di daerah dan mendorong ekonomi lokal.

2. Tantangan yang Dihadapi UMKM

UMKM menghadapi beberapa tantangan utama, terutama selama pandemi COVID-19 :

- 1) **Masalah Pasokan:** Pembatasan sosial skala besar (PSBB) menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dan distribusi logistik.
- 2) **Masalah Cash Flow:** Penurunan pendapatan akibat menurunnya daya beli konsumen menyebabkan banyak UMKM kesulitan menjaga arus kas mereka.
- 3) **Penurunan Permintaan:** Ketidakpastian pasar mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk UMKM.
- 4) **Keterbatasan SDM:** Pendidikan dan keterampilan pelaku UMKM yang rendah menghambat produktivitas dan inovasi usaha.

3. Strategi Pemerintah untuk Mendukung UMKM

- 1) **Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN):** Pemerintah memberikan insentif berupa restrukturisasi pinjaman, bantuan modal, dan subsidi listrik untuk mendukung UMKM yang terdampak pandemi.
- 2) **Digitalisasi UMKM:** Melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), sebanyak 11,7 juta UMKM telah masuk ke platform digital hingga akhir 2020. Targetnya adalah mencapai 30 juta UMKM digital pada tahun 2030.
- 3) **Regulasi Pro-UMKM:** UU Cipta Kerja 2020 diterapkan untuk menyederhanakan regulasi dan perizinan, sehingga mempercepat pengembangan UMKM.

4. Dampak Positif Strategi Pemerintah :

- 1) Penambahan akses pasar melalui digitalisasi telah membantu UMKM menjangkau konsumen lebih luas.
- 2) Dukungan finansial melalui program PEN membantu UMKM menjaga kelangsungan usaha selama masa krisis.
- 3) Regulasi baru mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus perizinan, meningkatkan daya saing mereka.

PEMBAHASAN

Definisi Administrasi Pembangunan

Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang mencakup pencatatan, pembuatan surat, pembukuan, dan pengarsipan surat, serta hal-hal lain yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan memudahkan akses ke informasi jika dibutuhkan. Sedangkan Menurut The Liang Gie (1980: 9), administrasi secara luas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Alexander (1994), pembangunan

(*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Demikian pula Riggs (1996), sebagaimana dikutip Ginandjar, menyatakan bahwa dalam membangun terdapat orientasi nilai yang menguntungkan (*favourable value orientation*). Oleh karena itu, jelas bahwa pembangunan tidak hanya merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik (dalam arti memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat), tetapi juga harus mempertimbangkan kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak mengalami resistensi di tengah masyarakat. Menurut J.B. Kristadi (1998), administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan. Sedangkan Menurut Sondang P. Siagian (1982: 4), administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, menurut pendapat beberapa ahli, administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang dilakukan oleh administrator untuk mendorong dan mengawasi masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multidimensional secara administratif dan terpadu.

Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan pemerataan pendapatan suatu negara dengan mengukur tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk.

Pembangunan ekonomi dapat berupa fisik (misalnya, gedung perkantoran, pertokoan, jalan raya, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sebagainya) atau non-fisik (misalnya, teknologi, listrik, dan sebagainya). (Chintya Kusuma Dewi, 2021, Dalam www.zenius.id). Definisi Pembangunan menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

- 1) Sadono Sukirno (1996)
Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui transformasi ekonomi potensial menjadi ekonomi nyata melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, peningkatan kemampuan berorganisasi, dan peningkatan kemampuan manajemen.
- 2) Adam Smith
Pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan atau kombinasi perkembangan teknologi dan pertumbuhan populasi.
- 3) Irawan (2002:5)
Diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita, peningkatan taraf hidup suatu negara dikenal sebagai pembangunan ekonomi.
- 4) (Lincoln Arsyad, 2010:11)

Meningkatkan PDB setiap tahun bukanlah satu-satunya cara untuk membangun ekonomi. Pembangunan ekonomi mencakup berbagai aspek masyarakat, bukan hanya satu (ekonomi). Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan batasan ini, pembangunan ekonomi umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menghasilkan peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang sambil memperbaiki sistem keuangan negara.

Jika kita melihat definisi para ahli, kita dapat mengatakan bahwa pembangunan ekonomi terdiri dari elemen-elemen penting berikut :

1. Dalam jangka panjang, upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita tidak akan berhenti.
2. Perubahan terus terjadi.
3. Penyempurnaan sistem kelembagaan di semua bidang (politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya).

Sehingga dampak yang ditimbulkan terjadi pada peningkatan kegiatan ekonomi ke taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya

Definisi UMKM

Beberapa lembaga memberikan definisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) :

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 pasal 1: Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Menurut Kementrian Koperasi dan UMKM dalam AUFAR (2014:8), Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Usaha Menengah (UM) adalah entitas usaha milik warga negara Indonesia dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000.

Menurut Bank Indonesia dalam AUFAR (2014:9), usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik itu badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi. UMKM tidak termasuk anak perusahaan atau cabang yang berafiliasi, dimiliki, atau

berafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Usaha menengah memiliki kriteria aset tetap antara 200.000.000 dan 600.000.000, tergantung pada industri manufaktur (antara 200.000.000 dan 500.000.000) dan non-manufaktur (antara 200.000.000 dan 600.000.000). Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak boleh melebihi 200.000.000.

Berdasarkan pemahaman di atas, UMKM adalah usaha milik individu atau individu dan badan usaha yang tidak merupakan anak cabang dari perusahaan lain dan memiliki modal usaha yang sudah ditentukan.

Karakteristik UMKM

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria dan ciri-ciri tertentu :

- 1) Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 mengenai UMKM, usaha mikro harus memiliki kekayaan bersih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 mengenai UMKM, kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), tanpa tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan pajak maksimal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Menurut Bab IV Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit pajak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, setiap usaha harus memenuhi kriteria atau karakteristik tertentu. Misalnya, usaha mikro harus memiliki aset sebesar 50 juta rupiah dan pendapatan sebesar 300 juta rupiah; usaha kecil harus memiliki aset sebesar 50 juta hingga 500 juta rupiah, dan pendapatan sebesar 300 hingga 2,5 miliar; dan usaha menengah harus memiliki aset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah, dan pendapatan sebesar 2,5 miliar hingga 50 miliar

Secara umum, dalam perekonomian nasional, UMKM memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi; menyediakan lapangan kerja; menciptakan pasar baru; memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan perekonomian lokal; dan memberikan kontribusi kepada PDB dan neraca pembayaran. Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu,

adalah cara lain untuk mengetahui kontribusi UMKM. Tujuan PDB adalah untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Jumlah kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional terdiri dari semua sektor ekonomi UMKM.

Bisnis kecil dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap PDB, mencapai 61,97% dari total PDB nasional, atau setara dengan Rp. 8.573,89 triliun pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2020, UMKM menyerap banyak tenaga kerja, mencapai 97% dari daya serap global usaha. Ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja. Walaupun UMKM sangat membantu pertumbuhan ekonomi nasional, mereka masih menghadapi banyak masalah. Pendidikan yang rendah, keterampilan dan pengalaman yang kurang, serta akses ke informasi adalah beberapa faktor yang sering menyebabkan masalah SDM bagi perusahaan kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada hampir seluruh sektor.

Namun, pihak yang dianggap paling terluka adalah pelaku UMKM. Selama pandemi Covid-19 mewabah di tanah air, pelaku UMKM menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, pasokan. Banyak perusahaan kecil dan menengah kami mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) diterapkan hampir di seluruh wilayah kami. PSBB juga mengganggu distribusi logistik, yang menyebabkan kiriman yang dipesan atau dibeli harus menunggu lama untuk diterima. Cash Flow adalah masalah kedua. Setelah PSBB dan physical distancing diberlakukan, banyak bisnis UMKM mengalami penurunan pendapatan karena tidak ada pelanggan yang membeli barang mereka. Selain itu, para usaha kecil dan menengah (UMKM) menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pinjaman modal. Pendapatan menurun, biaya produksi mahal, dan permintaan menurun adalah tantangan ketiga. Ketika pasar tidak pasti, permintaan produk UMKM berpengaruh.

Pemerintah berusaha untuk mendorong UMKM dengan restrukturisasi pinjaman, bantuan modal tambahan, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya. Ini dilakukan karena keadaan UMKM yang menurun di bidang pendapatan dan kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Di tahun 2020 dan 2021, pemerintah telah memberikan insentif kepada UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Lebih dari 30 juta UMKM menerima manfaat dari PEN dengan dana sebesar Rp 112,84 triliun. Pada tahun 2021, pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi tetap berlanjut. Hingga akhir 2020, 11,7 juta UMKM telah bergabung dengan platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), yang terus dilakukan pemerintah. Jumlah UMKM yang beralih ke digital diperkirakan akan mencapai 30 juta pada tahun 2030. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong ekspor barang Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day

(AOSD) di 2020. Selain itu, masalah perizinan Indonesia masih sangat kompleks karena ada banyak regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan di berbagai sektor, yang menyebabkan ketidakseimbangan, tumpang tindih, dan masalah sektoral. Dengan mengeluarkan UU Cipta Kerja 2020, pemerintah berusaha mengakomodir hal tersebut. Pemerintah berharap UU Cipta Kerja akan memfasilitasi, melindungi, dan mendorong UMKM.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Koperasi kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi, menyediakan lapangan kerja, menciptakan pasar baru, dan menjadi bagian penting dari perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. UMKM juga berkontribusi pada neraca pembayaran dan PDB. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah cara lain untuk mengetahui kontribusi UMKM. Namun, UMKM di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Selama pandemi Covid-19 mewabah di tanah air, pelaku UMKM menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, masalah pasokan; kedua, masalah cash flow; dan ketiga, penurunan permintaan. Mengingat kondisi UMKM saat ini, pemerintah sedang berusaha untuk mendukung UMKM dengan memberikan insentif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dan mendorong ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, pemerintah telah mengambil tindakan yang tepat. Hanya saja, pemerintah harus lebih memperhatikan dan merealisasikan program PEN dan Gernas BBI ini dengan baik untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional UMKM di Indonesia tetap stabil, terutama selama pandemi COVID-19.

PENELITIAN LANJUTAN

1. **Analisis Dampak Digitalisasi terhadap Kinerja UMKM**
Penelitian ini dapat mengkaji sejauh mana digitalisasi, yang didorong oleh program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan akses pasar UMKM. Studi ini juga dapat mengidentifikasi hambatan yang dihadapi UMKM dalam proses digitalisasi dan menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.
2. **Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program PEN berhasil mendukung keberlanjutan usaha UMKM selama pandemi COVID-19. Fokusnya meliputi penyaluran dana, dampak pada keberlangsungan usaha, dan tingkat kepuasan pelaku UMKM terhadap program tersebut.
3. **Dampak Kebijakan UU Cipta Kerja terhadap Pertumbuhan UMKM**
Penelitian ini dapat mengeksplorasi implementasi dan dampak dari UU Cipta

Kerja dalam memfasilitasi perizinan, akses modal, dan peluang pasar bagi UMKM. Studi ini penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.

4. **Pemberdayaan UMKM di Daerah Terpencil**
Penelitian ini dapat fokus pada bagaimana UMKM di daerah terpencil dapat diberdayakan melalui inisiatif pemerintah, seperti subsidi logistik, pelatihan, dan peningkatan infrastruktur. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terimakasih kepada dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, khususnya Bapak Naim, M.Pd pengampu Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan atas bimbingan dan arahnya yang sangat berarti dalam penyusunan artikel ini.

Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan peneliti dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan, referensi, serta motivasi selama proses penelitian ini berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith, Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. STIE YKPN. Yogyakarta
- Aufar, Arizali. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM .
- Chintya Kusuma Dewi. 2021. Pembangunan Ekonomi. www.zenius.id
- Hasan, Muhammad, and Muhammad Azis, Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal, CV. Nur Lina, 2018
- INVESTASI/BKPM, KEMENTERIAN, 'Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia' [accessed 4 October 2021]

Kompas.com, '3 Tantangan Utama Yang Dihadapi UMKM Selama Pandemi Covid19', 02/07/2020 /02/150000926/3-tantangan-utama-yang-dihadapi-umkm-selama-pandemi-covid19> [accessed 4 October 2021]

PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG, and REPUBLIK INDONESIA, 'Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih Di Masa Pandemi', 28 April 2021

Sofyan, Syaakir, 'Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia', Jurnal Bilancia, 11.1 (2017), 33-59

Sukirno, Sadono. 1996. Teori Pembangunan Ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 1. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 6. Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah